Pemanfaatan Kawasan Borobudur Tinjauan Aspek Peraturan Perundang-undangan

Oleh:
Sugiyono, SH
Balai Konservasi Peninggalan Borobudur

Pendahuluan

Candi Borobudur merupakan peninggalan masa dinasti Syailendra yang menganut agama Buddha Mahayana yang diperkirakan dibangun pada abad ke VIII Masehi, yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Upaya pelestarian dan perlindungan kawasan Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia diantaranya adalah dengan pemintakatan kawasan yang terbagi menjadi 5 zona (JICA 1979). Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pelestarian dan perlindungan Candi Borobudur dan kawasannya yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992, Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya. Untuk upaya melindungi Benda Cagar Budaya, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992.

Seiring waktu berjalan dalam perkembangannya pemanfaatan dan pengelolaan Candi Borobudur beserta kawasannya terdapat pembangunan-pembangunan yang dapat mengganggu kelestarian Candi Borobudur dan benda cagar budaya di sekitar Borobudur.

Studi tentang "Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Borobudur: Tinjauan Aspek Peraturan Perundang-undangan" ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan kawasan Borobudur sudah berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau belum, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala belum adanya kesesuaian pemanfaatan kawasan Borobudur sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Upaya pelestarian kawasan Borobudur telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan JICA dengan membuat masterplan Borobudur pada tahun 1979 yang di antara isinya adalah mengatur pembagian zonasi kawasan Borobudur menjadi 5 zona, yang bertujuan untuk melindungi candi Borobudur beserta kawasannya. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. Dalam Keppres tersebut disebutkan tentang pembagian zonasi kawasan Borobudur menjadi 3 (tiga) zona.

Pembagian zonasi dalam Keppres tersebut berbeda dengan pembagian zonasi pada masterplan JICA tahun 1979, sehingga pada pelaksanaan di lapangan membingungkan para pengelola dan masyarakat dalam menentukan zonasi yang akan digunakan, apakah menggunakan Keppres atau JICA. Selain itu, Keputusan Presiden

Nomor 1 Tahun 1992 ini juga belum sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1993 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya pasal 23 ayat (2) dan (3) Tentang pemintakatan situs. Dalam Pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa " untuk kepentingan perlindungan benda cagar dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan" dan ayat (3) berbunyi "Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan". Dalam penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa Batas-batas situs ditetapkan berdasarkan atas batas asli bila masih ada; atau bila tidak ada lagi ditinjau dari keadaan geotopografis setempat seperti lereng, sungai, lembah dan sebagainya, atau kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya. Batas lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan ataupun pengembangan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek warisan budaya; dan ayat (3) berbunyi ; Yang dimaksud dengan sistem pemintakatan (zoning) adalah penentuan wilayah mintakat situs dengan batas mintakat yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan. Sistem pemintakatan dapat terdiri dari mintakat inti atau mintakat cagar budaya yakni lahan situs; mintakat penyangga, yakni

lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs dan mintakat pengembangan yakni lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya sangat jelas disebutkan bahwa mintakat penyangga (zona II) adalah lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs. Sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 disebutkan bahwa zona II adalah kawasan di sekeliling candi dan diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan dan pelestarian lingkungan candi. Melihat isi Keppres tersebut, lebih tepat jika zona II yang disebutkan dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1992 masuk dalam zona III seperti yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, sehingga dengan demikian perlu dilakukan revisi terhadap Keppres Nomor 1 Tahun 1992 disesuaikan dengan Perundang-undangan yang ada dan data-data kondisi di lapangan. Sementara sampai saat ini penataan / zoning di kawasan Borobudur masih menggunakan master plan JICA, padahal dari sisi Hukum kedudukan JICA tersebut tidak mengandung kekuatan hukum.

Pengelolaan Candi Borobudur

Pengelolaan Candi

Borobudur sepenuhnya dilakukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Balai konservasi Peninggalan Borobudur untuk perawatan dan pemeliharaan candi (zona 1) dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, sebuah BUMN sebagai pengelola taman wisata (zona 2). Balai Konservasi Peninggalan Borobudur adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Peninggalan Purbakala, Dirjen Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sumber dana untuk pelestarian candi berasal dari APBN. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur memfokuskan pengelolaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi yang berwenang mengelola kelestarian Candi Borobudur.

1. Zona I

Pemanfaatan candi sebagai obyek wisata lebih difokuskan untuk tujuan pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kecintaan dan kebanggaan akan kekayaan budaya yang dimiliki, serta untuk memperkokoh jati diri Bangsa.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, Tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 19 (1) menyebutkan bahwa "Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan."

Pada masterplan JICA

disebutkan tiga pilar didirikannya Taman Arkeologi Nasional Borobudur, yaitu sebagai tempat ritual, pusat studi arkeologi di Indonesia dan untuk anak-anak di masa depan.

Berdasarkan konsep di atas, bahwa zona I adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu pemanfaatan Candi Borobudur tetap dikendalikan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.

Namun berdasarkan pengamatan dari sisi dampak pemanfaatan Candi Borobudur sebagai obyek wisata adalah banyaknya sampah yang berserakan mengotori candi, bahkan kotoran tersebut masuk ke dalam sela-sela batu candi dan masuk ke dalam saluran air (*drainase*). Hal tersebut dapat mengganggu kelestarian Candi Borobudur. Kemudian pada saat *peak season* pengunjung secara bersamaan menaiki candi dengan berbagai perilaku seperti, menaiki stupa atau dinding-dinding candi, corat-corek (*vandalisme*).

2. Zona II.

Kawasan zona II pada dasarnya telah diatur di dalam Kepres Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan

kawasannya. Pasal 5 (1) menyatakan bahwa "Zona II merupakan kawasan di sekeliling zona I masing-masing candi dan diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan dan pelestarian lingkungan candi". Secara substansional berisi tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan taman oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, baik yang menyangkut kewenangan maupun kewajiban-kewajibannya selaku pengelola.

Keppres No. 1/1992 dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa Candi Borobudur dan Prambanan sebagai peninggalan budaya bangsa harus tetap dijaga kelestariannya dengan cara menciptakan suasana lingkungan yang akan memberikan dukungan kepada keagungan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu diperlukan pembangunan taman dan fasilitas lain di sekeliling candi yang fungsinya sekaligus dapat menunjang pengembangan pariwisata kawasan. Selain itu dalam Keppres juga ditetapkan sistem zoning untuk menentukan batas-batas peruntukan kawasan. Secara Prinsip kawasan zona II adalah sebagai zona penyangga untuk pelestarian Candi Borobudur. Dalam implementasinya di

lapangan, pemanfaatan di zona II terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti:

- Pengalihan fungsi Pusat Studi Borobudur yang tercantum dalam *masterplan JICA 1979* menjadi Hotel Manohara.
- Pengalihan fungsi salah satu bagian di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur menjadi Museum Rekor Indonesia (MURI)/Galeri Unik dan Seni Borobudur yang tidak ada hubungannya dengan Candi Borobudur.
- Pembangunan panggung di lapangan Aksobya (sebelah Timur candi) yang dipergunakan sebagai tempat pementasan sendratari Mahakarya Borobudur. Sebenarnya tanah tersebut masih merupakan lahan zona I.
- Tempat parkir yang banyak memakan tempat, dan penampungan kios-kios souvenir untuk dapat menampung pedagang yang jumlahnya cukup banyak.

Masalah lain yang terlihat adalah, seperti ijin pemanfaatan di zona I harus diajukan kepada Direktorat Peninggalan Purbakala di Jakarta yang tembusannya disampaikan kepada Balai Konservasi Peninggalan Borobudur selaku UPT di daerah yang

mengelola pelestarian candi. Sedangkan ijin pemanfaatan di zona II diajukan kepada PT Taman Wisata. Dengan demikian apabila pemanfaatan dilakukan di zona I dan zona II yang berada dalam satu kawasan, prosedur perijinannya harus diajukan kepada kedua Instansi pengelola tersebut. Hal ini menjadi rancu karena adanya kesalahan dalam mempersepsikan pembatasan zonasi yang sebetulnya dimaksudkan sebagai batas peruntukan bagi kepentingan pelestarian candi, namun dalam implementasinya diterjemahkan menjadi batas-batas kewenangan pengelolaan. Dengan demikian hal ini kelihatan membingungkan dan dianggap prosedurnya tidak efisien dan efektif.

3. Zona III - V

Zona III merupakan kawasan di luar zona II Candi Borobudur dan diperuntukkan bagi pemukiman terbatas, yang fungsinya adalah untuk mengontrol pengembangan daerah. Zona III merupakan daerah jalur hijau, daerah pertanian untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan di zona I pada umumnya serta untuk mendukung kelestarian candi dan fungsi Taman Wisata pada khususnya. Zona IV merupakan zona perlindungan daerah sejarah. Fungsinya adalah untuk keseimbangan kawasan untuk mendukung kelestarian situs, khususnya Candi Borobudur. Zona V untuk mempertahankan

tinggalan arkeologi, yang harus tetap dipertahankan keberadaannya, baik tinggalan yang sudah diketemukan maupun belum diketemukan. Kawasan ini masih sangat luas untuk daerah penelitian arkeologi.

Oleh karena itu kondisi kawasan ini harus tetap terjaga dengan baik. Zona III – V dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Namun dalam pemanfaatannya terdapat penyimpangan–penyimpangan antara lain:

- Rencana pembangunan *Shopping Street* bermula pada tahun 2004 sebagai tindak lanjut gagalnya rencana pembangunan Pasar Seni Jagad Jawa (PSJJ) pada tahun 2003. Sebagaimana rencana awal pembangunan *Shopping Street* dengan cara mengeser pagar kawasan zona II Candi Borobudur sejauh 30 meter ke arah candi, dalam rangka pengembangan aspek ekonomi pemasaran perdagangan. Karena posisi pedagang dengan dibangunnya *Shopping Street* lebih strategis untuk para pedagang dalam memasarkan dagangannya. Namun rencana tersebut ditentang oleh masyarakat dan tidak jadi dilaksanakan.
- Pendirian bangunan Vihara sebagai prasarana mendukung dalam pelaksanaan Upacara Waisak dan kegiatan lain di kawasan Candi Borobudur. Lokasi yang dipilih adalah di Dusun Ngaran II Borobudur yang hanya berjarak sekitar 800 m dari candi Borobudur. Lokasi ini

tepatnya di zona III berbatasan dengan zona II kawasan Borobudur. Dalam pembangunan ini kurang sesuai dengan tujuan pemintakatan zona III yaitu sebagai zona yang diperuntukkan bagi pemukiman terbatas dan merupakan daerah jalur hijau. Dengan adanya bangunan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan situs Candi Borobudur.

- Pendirian menara transmiter oleh jaringan telepon seluler yang bertebaran di kawasan Candi Borobudur khususnya di zona III sampai zona V. Terdapat kurang lebih 12 buah menara di kawasan ini, yang sangat kelihatan mencolok adalah terdapat di Dusun Kaliabon, didalam 1 (satu) RT terdapat 5 menara transmiter berketinggian $\pm$ 72 m; dan 2 (dua) menara di Brongsongan dan Tidaran (zona III) yang hanya berjarak $\pm$ 1000 m dari Candi Borobudur. Hal ini jelas sudah merubah *landscape*, dan *mengganggu* pemandangan.
- Pendirian baliho–baliho berukuran besar yang terdapat di sepanjang jalan utama menuju Candi Borobudur. Lokasi pendirian baliho–baliho merupakan lingkungan yang strategis, sehingga akan menutup dan mengganggu pemandangan.
- Pendirian penunjang fasilitas pariwisata seperti,

kios-kios souvenir, penginapan/Hotel, rumah makan, bangunan berskala besar sehingga akan mengganggu panorama.

- Rencana pembangunan *Asphalt Mixing Plant* (pada tahun 2004-2005) oleh PT Bumi Redjo di kawasan Candi Borobudur (pada zona IV). Pemerintah Daerah telah melakukan upaya bersama Balai Konservasi Peninggalan Borobudur secara administratif prosedural dan aspek hukum. Berkaitan dengan awal rencana pembangunan *Asphalt Mixing Plant* oleh PT. Bumi Redjo. Pembangunan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dikawatirkan aktivitas ini, pengaruh asapnya akan merusak batu-batu candi. Akhirnya kegiatan tersebut tidak berjalan sampai saat ini.

Pelestarian tidak hanya dilakukan untuk Candi Borobudur saja. Berdasarkan laporan ROD, hasil penelitian Wiwit Kasiyati dan Yudi Suhartono(2002), menunjukkan bahwa di sekitar kawasan Borobudur terdapat banyak situs-situs baik yang masih utuh maupun fragmen baik itu situs yang agama Hindu maupun Budha, situs-situs tersebut kebanyakan tersebar di zona III–V dan kebanyakan berada di pemukiman penduduk. Namun kondisinya pada saat ini kurang terawat, bergeser tempat, hilang dan bahkan dimanfaatkan oleh penduduk untuk pembangunan rumah.

Faktor-faktor Pengaruh:

1. Faktor Ekonomi

Semenjak diresmikannya pasca pemugaran (tanggal 13 Februari 1983). Candi Borobudur dan sekitarnya dibuka kembali untuk para wisatawan sebagai Taman Arkeologi Nasional. Kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut tidak lepas dari membaiknya kondisi perekonomian dan terjaminnya keamanan dalam negeri. Puncak kunjungan terbesar terjadi pada tahun 1996/1997 (sebelum krisis ekonomi) yang mencapai 2.500.000 orang. Hal tersebut kemudian menjadikan Candi Borobudur menjadi magnet bagi dunia pariwisata, menjadi icon Indonesia dan daerah tujuan wisata utama.

PT Taman Wisata Candi Borobudur sebagai institusi yang mengelola wisata di kawasan Borobudur, mengembangkan zona II dengan membangun fasilitas-fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata seperti, area parkir, kios-kios souvenir, taman bermain, atraksi gajah, Museum Muri, Museum Kapal Samudraraksa, panggung pementasan sendratari Mahakarya Borobudur dan Hotel Manohara.

Dalam pembangunan dan penambahan fasilitas – fasilitas semakin lama cenderung berorientasi pada bisnis, tanpa memperhatikan aspek lain seperti, kelestarian

kawasan Candi Borobudur. Sementara itu di zona 3 di luar pagar zona 2 tumbuh dan berkembang aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sektor pariwisata seperti: rumah makan, penginapan, hotel, jasa transportasi. Para Investor atau kalangan bisnis melirik kawasan Borobudur sebagai lahan baru dalam menjual produknya, seperti terlihat memasang reklame berukuran besar pada tempat-tempat yang strategis, pembangunan menara trasmitter, pembangunan Hotel bertaraf Internasional. Persaingan bisnis sangat kelihatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang membuat masyarakat bersifat apatis terhadap lingkungan sekitar

2. Faktor Sosial

Pada saat pemugaran ke II tahun 1973–1983, untuk kepentingan pelestarian dibuat master plan yang penataannya berkonsep Taman (JICA, 1979), maka diperlukan lahan yang luas. Kemudian dilakukan pembebasan tanah penduduk di sekitar Candi Borobudur. Dalam hal ini Pemerintah memberi ganti rugi kepada penduduk. Dalam usaha pembebasan tanah tersebut terjadi pro dan kontra, karena ada yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak – pihak yang merasa dirugikan membentuk kelompok-kelompok yang tidak senang kepada pihak pengelola Taman Wisata secara berkelanjutan. Mereka menganggap pihak pengelola Taman Wisata memonopoli,

sehingga tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar terutama kepada penduduk asli Borobudur.

Dampak negatif ketidakselarasan antara pihak pengelola Taman Wisata dan masyarakat berdampak pada kurangnya ketaatan atau ketertiban masyarakat terutama pedagang dalam mematuhi peraturan yang berlaku sehingga terjadi konflik yang berkelanjutan.

Banyaknya penjual cinderamata maupun pengasong, yang jumlahnya mencapai ribuan orang justru kebanyakan adalah pendatang. Mereka berjualan di wilayah taman (zona II). Dengan semakin bertambahnya penjual souvenir sehingga menjadi sulit diatur dan kurang terkontrol. Persaingan diantara mereka juga semakin ketat dan menjadikan zona II semakin semrawut. Untuk mendapatkan penghasilan, mereka sering melanggar aturan dengan berdagang di zona larangan berjualan, sehingga mengakibatkan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur menjadi terganggu kenyamanannya.

3. Faktor Budaya

Adanya kesenjangan budaya antara lain disebabkan oleh perbedaan pendukung kebudayaan masa lalu, masa berdirinya Candi Borobudur dengan masa sekarang, membuat masyarakat sekitar Candi Borobudur kurang mempunyai “rasa memiliki”. Karena adanya perbedaan

budaya sedikit demi sedikit mulai melunturkan nilai-nilai kearifan lokal yang berasal dari masa lalu seperti, sopan santun, rasa berbagi, kerukunan, kebersamaan dan sebagainya. Hal-hal tersebut menjadikan masyarakat berubah orientasinya kepada hal-hal yang bersifat materi. Ditambah pula, sistem pendidikan yang ada belum mampu untuk menanamkan mental budaya yang kuat kepada masyarakat untuk sadar budaya. Rendahnya rasa memiliki, kurangnya informasi, minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat secara tidak sadar melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan upaya-upaya pelestarian.

4. Faktor Hukum

Peraturan dan Perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan Candi Borobudur dan BCB lainnya masih belum seperti, master plan (zoning), peraturan tentang batasan aktivitas, pembangunan di zona I-V kriteria tidak jelas dan tidak disertai dengan sanksi yang tegas. Oleh karena itu perlu dirumuskan peraturan yang khusus, jelas dan disertai sanksi yang tegas. Pelaksanaan Perundang-undangan belum harmonis antar Perundang-undangan, seperti Undang-undang Benda Cagar Budaya, Undang-undang Pariwisata, Undang-undang Telekomunikasi dan lain-lain.

Penutup

Seiring berjalannya waktu pemanfaatan kawasan Candi Borobudur terdapat pembangunan-pembangunan yang dapat mengganggu kelestarian

Borobudur sebagai Warisan Dunia dan dari sisi Hukum belum berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam upaya perlindungan dan pelestariannya antara lain:

- Zona I adalah zona pelestarian tempat keberadaan Candi Borobudur, pada zona ini belum ada aturan yang rinci tentang aktivitas pemanfaatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- Zona II adalah sebagai zona penyangga bukan sebagai pengembangan perekonomian. Namun pada zona II terdapat Hotel Manohara, Pembangunan Museum Muri yang tidak ada hubungannya dengan Candi Borobudur, pembangunan panggung di lapangan aksobya (kawasan zona I), tempat parkir dan penampungan PKL yang fungsi semula sebagai rest area.
- Zona III-V, khususnya zona III, merupakan kawasan diluar zona II yang diperuntukkan bagi pemukiman terbatas, yang fungsinya untuk mengontrol pengembangan daerah, sebagai daerah jalur hijau untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan di zona I dan untuk mendukung kelestarian candi. Namun dalam realitanya terdapat penyimpangan seperti, rencana pembangunan *shopping street* / Pasar Seni Jagad Jawa PSJW (2002-2003), pembangunan Vihara di Dusun Ngaran II (800 m dari candi), pendirian menara transmiter (± 12 buah terdapat di zona III-V), pendirian baliho berukuran besar di sepanjang jalan utama menuju Candi Borobudur, pendirian fasilitas penunjang pariwisata dan kios souvenir, losmen/Hotel, rumah makan, rumah berskala besar/tinggi. Dengan adanya

bangunan tersebut dikawatirkan akan mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan situs dan candi serta merusak pemandangan atau panorama. Situs-situs yang tersebar di zona III-V yang kebanyakan berada di pemukiman penduduk kondisinya banyak yang tidak terawat bahkan hilang dan rusak. Pemanfaatan di kawasan Candi Borobudur yang belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial budaya, hukum dan sangsi yang tidak jelas.

Daftar Pustaka

- Maulana Ibrahim, Linda Chaerosti, 1976/1977. *Borobudur Dalam Data, Departemen Pendiidkan dan kebudayaan*. Jakarta
- Muhammad Taufik, 2005. *Minimalisasi Dampak Negatif Pemanfaatan Candi Borobudur Sebagai Objek Wisata*, Tesis S-2 Program Studi Arkeologi. Program Pasca Sarjana UGM
- Winarni, 2006. *Kajian Perubahan Ruang Kawasan World Cultural Heritage Candi Borobudur*, Tesis S-2 Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah Jurusan Ilmu-ilmu Teknik. Program Pasca Sarjana UGM.
- Ari styastuti, 2005. *Evaluasi kebijakan Pengelolaan Candi-candi Di Kawasan Prambanan (Analisis berdasarkan Pendekatan Pengembangan Pariwisata yang berkelanjutan)*, Tesis S-2 Program Studi Kajian Pariwisata Jurusan M a n a j e m e n d a n

Kelembagaan Program Pasca Sarjana UGM.

David Antony, 2007. *Implementasi Keputusan Presiden Nomo. 1 tahun 1992 Dalam Pengelolaan Candi Borobudur*, Skripsi S-1 . Universitas M u h a m m a d i y a h . Yogyakarta.

Anonim.1992. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*. Depbudpar. Jakarta.

Anonim.1993. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*. Depbudpar. Jakarta.

Anonim.2006. *Peraturan Menteri kebudayaan dan Parwisata N o m o r : PM.40/OT.001/MKP-2006*. Depbudpar. Jakarta.

Anonim. 1992. *Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 tahun 1992 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya*. Jakarta. Unpublished.

Anonim.2001. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2001-2010*. Bappeda Kabupaten Magelang.

JICA. 1979. *Masterplan Borobudur Archaeology Park*. JICA-Departemen Pendidikan Nasional-Departemen Perhubungan, Komunikasi, dan Pariwisata. Jakarta.

Liflet. 2001. *Candi Borobudur Warisan Budaya Dunia, UNESCO*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta

Pemanfaatan Candi Borobudur